

PENJELASAN CAPAIAN IKU BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TA. 2019-2021

1. Persentase perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016 telah dilakukan Penataan OPD di Provinsi Papua sesuai kebutuhan daerah dengan PERDA Nomor 19 Tahun 2016, pada Tahun 2019 dilakukan Evaluasi dan menghasilkan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai perubahan PERDA Nomor 19 Tahun 2016, pada Tahun 2020-2021 dilakukan penyetaraan jabatan untuk OPD dan hasilnya telah dikirim ke Kemendagri dan Kemenpan RB namun dengan Surat Gubernur diajukan untuk menunda pelaksanaan penyetaraan jabatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada Tahun 2021 dilakukan evaluasi dan pemetaan tugas pokok dan fungsi terdiri atas 29 SKPD dengan persentase 82,85 persen. Dan ada 6 OPD yang dilakukan perubahan/evaluasi ulang terhadap OPD. Dinamika penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (right function) dan tepat ukuran (right sizing) dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) terus dilakukan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tetapi untuk Provinsi Papua perlu memperhatikan kekhususan dalam rangka mencapai sasaran Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Bila dikaitnya dengan target RENSTRA ada penurunan 2 persen atas capaian kinerja OPD.
2. Untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), Tahun 2021 telah dilakukan Biro Organisasi telah memfasilitasi penyetaraan jabatan kepada Kabupaten/Kota dengan mengadakan Rapat Kerja Teknis Pembinaan OPD Kabupaten/Kota se Papua pada Tanggal 17 Maret 2021 di Manado, dengan hasil penyetaraan jabatan telah dilaporkan/dikirim ke Kemendagri dan Kemenpan RB dalam bentuk data terdiri atas 25 (dua puluh lima) atau 86,20 persen Kabupaten yang sudah dikirim ke Pemerintah pusat, dan masih ada 4 (empat) atau 13,79 persen Kabupaten yang belum mendapat persetujuan dari Pimpinan Daerah karena belum disetujui, bila dikaitkan capaian sasaran dengan RENSTRA ada peningkatan 6 persen dari target RENSTRA yang ditetapkan.
3. Cakupan monitoring dan evaluasi data Kelembagaan perangkat daerah Kab/kota dengan capaian sasaran 448 persen, sangat tinggi karena rendahnya target yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan target RENSTRA sudah 100 persen dilakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan 29 Kab/Kota di Papua.
4. Presentase SKPD yang melaksanakan SPP dengan capaian sasaran 57,14 persen, karena baru 10 OPD yang menyampaikan hasil penyusunan penyelenggaraan pelayanan publik, bila dibandingkan dengan target RENSTRA ada peningkatan 7,14 persen, jadi masih ada 25 OPD yang harus melaporkan hasil penyusunan penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur Tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/116 Tahun 2021 Tanggal 17 Maret Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Standarisasi Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun SOP OPD sebanyak 28 OPD, terealisasi 80 persen, sisa 7 OPD atau 20 persen yang belum melakukan penyusunan, bila dikaitkan dengan target RENSTRA pada tahun ke3 sudah 90 persen, dengan demikian ada penurunan capaian 10 persen.
6. Untuk mencapai sasaran Peningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah terpasang Jumlah Papan nama jabatan dengan realisasi 411 papan nama, untuk 2020-2021 seluruh papan nama jabatan telah terpasang. Bila dibandingkan dengan target pada RENSTRA ada penurunan 89 papan nama.
7. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI untuk tahun 2019-2020 naik 1,93 persen dengan nilai "B" (64,53), hasil penilaian LKj Gubernur untuk Tahun 2021 sedang dalam proses penyusunan target nilai "BB". bila dibandingkan dengan target pada RENSTRA masih tetap.

8. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja pemerintah Biro Organisasi oleh Inspektorat untuk tahun 2019-2020 naik 3,03 persen dengan nilai "A" (87,35), hasil penilaian LKj untuk Tahun 2021 sedang dalam proses penyusunan target nilai bila dibandingkan dengan target pada RENSTRA yaitu "BB" maka ada peningkatan nilai menjadi "A".
9. Predikat Penilaian PMPRB Provinsi Papua dari tahun 2019-2020 ada penurunan 5 persen (61,654 - 56,61) dengan nilai dari B turun menjadi CC, untuk Tahun 2021 ditargetkan nilai "BB", bila dikaitkan target nilai "B" pada RENSTRA capaian sasaran turun menjadi "CC".
10. Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen data uraian jabatan 35 OPD dengan jumlah jabatan struktural sebanyak 1192 dan saat ini akan diajukan untuk mendapat penetapan dengan peraturan Gubernur capaian ini meningkat bila dikaitkan dengan target pada RENSTRA yaitu dengan target 50 persen.
11. Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen ABK bagi 35 OPD dan saat ini akan diajukan untuk mendapat penetapan dengan peraturan Gubernur capaian ini sesuai dengan target pada RENSTRA yaitu dengan target 100 persen.
12. Persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen data formasi jabatan bagi 35 OPD dan telah digunakan dalam formasi penerimaan CPNS, capaian ini sesuai dengan target pada RENSTRA pada tahun ke2 25 persen dan ke3 25 persen, dengan demikian ada kenaikan capaian sasaran 50 persen.
13. Persentase Jabatan Fungsional tertentu pada SKPD di Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen jabatan pelaksana sebanyak 3700 Jabatan dan jabatan fungsional sebanyak 153 jabatan dari bagi 35 OPD, bila dikaitkan dengan target pada RENSTRA pada tahun ke1 dan ke2 tercapai 100 persen, walaupun kegiatan ini tidak dilaksanakan dalam kegiatan/dianggarkan dalam DPA SKPD tetapi telat dilaksanakan dengan capaian 100 persen.
14. Persentase SKPD yang memiliki evaluasi jabatan Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen evaluasi jabatan dan telah di verifikasi oleh BKN dan Kemenpan RB, dengan capaian 100 persen dan telah mencapai target pada RENSTRA.
15. Cakupan OPD Provinsi yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen analisis dan/atau evaluasi jabatan dan telah di verifikasi oleh BKN dan Kemenpan RB, dengan capaian 100 persen dan telah mencapai target pada RENSTRA.
16. Persentase OPD yang memiliki data kompetensi jabatan Tahun 2022 baru akan dilaksanakan sesuai DPA SKPD.

Jayapura 15 Pebruari 2022

KEPALA BIRO,



LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19720911 199112 2 001